LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai Triwulan II melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
4. Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024.

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PeraturanBupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten NganjukTahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja, tujuan dan sasaran DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja(apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerjayang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakankriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

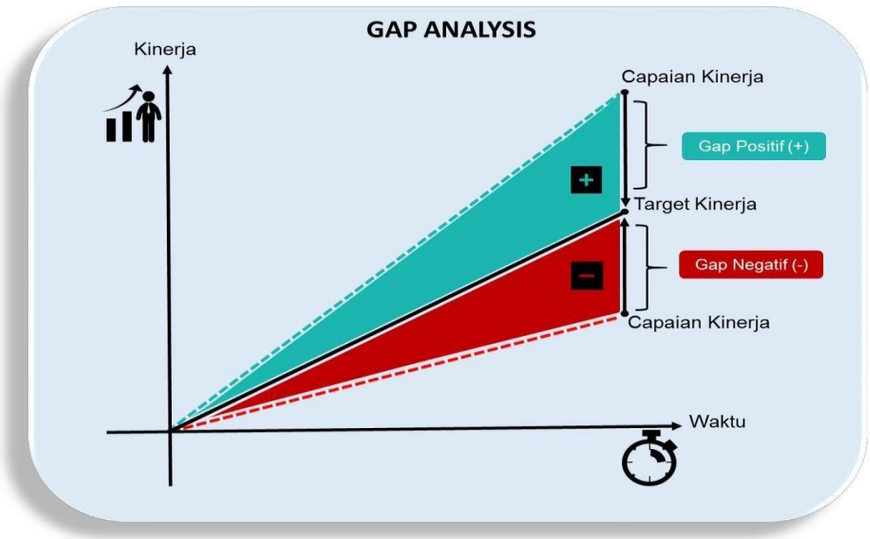
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telahmemenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkanantara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



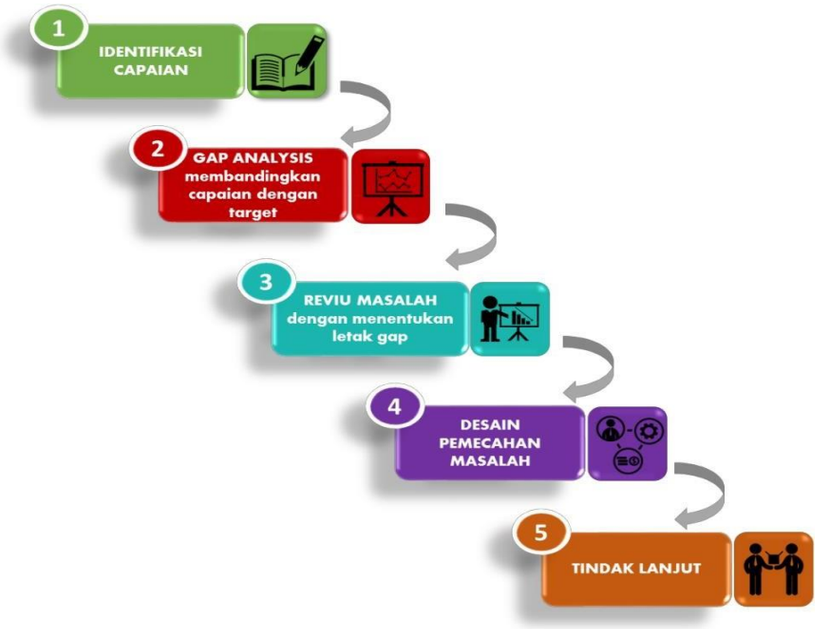
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupunnegatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangantersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biayayang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasiRenja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikansebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan Meningkatnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyrakat Guna Mendukung Penanggula ngan Kemiskinan	1. Indeks Desa Membangun IDM 2. Tingkat Status Perkembangan Desa	11,74%	0,78191 %	29,9 %
	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiridan Status Perkembangan Desa		15%	15%	100%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Pencapaian status Desa Mandiri.

Kegiatan pemutakhiran IDM di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025

1. Telah mencapai target yang di tentukan bahkan melebihi tercapai 79 Desa (29,9%)

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Hasil Survei Kepuasan Masyarakat***	**80**	**6.227.402.191**	74,71	**2.060.301.388**	***93,39%***	***33,08%***
1.1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**39.307.200**	**7 Laporan**	**10.467.000**	50%	***26,63%***
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 Laporan	39.307.200	7 Laporan	10.467.000	50%	***26,63%***
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu**	**105 Dokumen**	**5.147.201.059**	**96 Dokumen**	**1.793.245.612**	**24,90%**	**34,84%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	5.134.488.059	**31 Orang/12 bln**	1.787.075.612	**100%**	**34,80%**
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	2 Laporan	5.691.000	0 Laporan	0	**0%**	**0%**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuang Bulan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	72 Laporan	7.022.000	21 Laporan	6.170.000	**29,17%**	**87,87 %**
1.3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Kehadiran ASN**	0	-				
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai						
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta adtribut Kelengkapannya						
1.4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**3.612 Dokumen**	**379.620.800**	**- Dokumen**	**54.108.386**	**1,99 %**	***10,60%***
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponeninstalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	9.998.900	1 paket	1.206.500	100 %	***12,07%***
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	57.975.400	2 Paket	18.040.531	25%	***31,12%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	2 Paket	2.152.500	2 paket	1.972.000	100%	***91,61%***
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	540.000	25%	***18,00%***
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550 Laporan	277.928.000	48 Laporan	24.311.500	8,54%	***8,75%***
1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD	3.000 Dokumen	28.566.000	1.000 Dokumen	8.037.855	33,33%	***28,14%***
1.5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Yang Tersedia Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 unit**	**61.630.308**	**4 Unit**	**30.003.300**	**100 %**	***48,68%***
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatanyang di sediakan						
1.5.2	Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan yang disediakan						
1.5.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yangdisediakan	0 unit	0	0 Unit	0	0%	*0%*

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yangdi sediakan	4 Unit	61.630.308	4 Unit	30.003.300	100%	***48,68%***
1.6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**50 Laporan**	**88.276.000**	**7 Laporan**	**20.915.455**	17,33%	***24,81%***
1.6.1	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	2 Laporan	26.276.000	1 Laporan	6.527.855	50,00%	***36,65%***
1.6.2	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	62.000.000	6 laporan	14.387.600	20,83%	***22,02%***
1.7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi**	**69 Unit**	**511.366.824**	**39 Unit**	**151.561.635**	**56,52%**	**15,49%**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang dibayarkan	7 Unit	295.862.443	2 Unit	71.603.825	28,57%	***24,20%***
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	3.302.754	20 Unit	3.270.750	100%	***99,03%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	38.850.000	15 Unit	16.845.000	37,5%	43,36%
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2 Unit	173.351.627	2 Unit	59.842.060	100%	***34,52%***
2.	***PROGRAM PENATAAN DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan FasilitasiPenataan Desa***	**24%**	**63.964.100**	**11,4 %**	**440.000**	47,5%	***0,69%***
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa**	**66 Desa**	**63.964.100**	**27 Desa**	**440.000**	40,90%	***0,69%***
2.1.1	Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa	11.017.650	0 Desa	0	0,00%	***0,00%***
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	30.685.000	0 Desa	0	0,00%	***0,00%***
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	26 Desa	7.779.200	27 Desa	440.000	103,85%	***5,66%***
2.1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaandan Kode Desa						

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
2.1.5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota						
2.1.6	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	20 Unit	14.482.250	0 Unit	0	0,00%	***0,00%***
3.	***PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan***	**87%**	**121.864.950**	**8%**	**32.398.884**	**9,19%**	***26,59%***
3.1.	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**	**230 Desa**	**121.864.950**	**4 Dokumen**	**32.398.884**	**9,19%**	***26,59%***
3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa	10 Dokumen	84.693.850	2 Dokumen	26.358.044	20,00%	***31,12%***
3.1.2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja sama antarDesa dengan pihak Ketiga	15 Dokumen	5.047.750	2 Dokumen	0	13,33%	***0,00 %***
3.1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	32.123.350	0 Dokumen	6.040.840	0,00%	***18,80%***
4.	***PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola***	**100%**	**3.318.503.825**	**0%**	**607.667.840**	**38,00%**	***44,18%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Pemerintahan Desa						
4.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**100%**	**3.318.503.825**	**0%**	**607.667.840**	**38,00%**	***44,18%***
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	4 Dokumen	8.201.900	0 Dokumen	0	0,00 %	***0,00%***
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	528 Dokumen	59.168.500	0 Dokumen	0	0,00%	***0,00%***
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	264 Dokumen	25.273.500	0 Dokumen	0	0,00%	***0,00%***
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan KeuanganDesa	264 Dokumen	2.907.391.775	0 Dokumen	1.104.719.342	0,00%	***37,99%***
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	8.400.500	0 Orang	975.000	0,00%	***11,60%***
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	80 Dokumen	39.704.750	0 Dokumen	0	0,00%	***0,00%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
4.1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	167.358.500	0 Laporan	7.748.100	0,00%	***4,63%***
4.1.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	7.279.400	0 Laporan	1.700.000	0,00%	***23,35%***
4.1.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen ProfilDesa	264 Dokumen	9.056.000	0 Dokumen	0	0,00%	***0,00%***
4.1.10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Aset Desa	264 Dokumen	29.362.200	0 Dokumen	1.503.000	0,00%	***5,12%***
4.1.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	100 Orang	6.078.800	0 orang	0	0,00 %	***0,00%***
4.1.12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan HasilPembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan	7.618.000	1 Laporan	3.868.000	50 %	***50,77%***
4.1.13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembanganDesa serta lomba Desa	21 Dokumen	43.610.000	0 Dokumen	0	0,00%	***0,00%***
5	***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT***	***Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan***	**45%**	**614.644.600**	**35%**	**201.335.704**	49,12 %	***32,76%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
5.1.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**	**118 Desa**	**614.644.600**	**41 Desa**	**201.335.704**	**0,00 %**	***32,76 %***
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa danmasyarakat Hukum adat	300 Dokumen	76.049.450	52 Dokumen	15.647.500	17,33%	***20,57%***
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	384 Lembaga	64.214.150	234 Lembaga	33.680.000	60,94%	***52,45%***
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan	2 Dokumen	14.842.800	0 Dokumen	707.000	0%	***4,76%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Pendapatana Asli Desa						
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemenfataan teknologi Tepat Guna	2 Laporan	62.784.000	1 Laporan	46.384.000	50%	***73,88%***
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	29.102.700	0 Laporan	12.563.000	0%	***43,17%***
5.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	110 Dokumen	367.651.500	22 Dokumen	92.354.204	20%	***25,12%***
				10.346.379.666		**3.414.989.418**	**72,46%**	**44,93 %**

1. **Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025**

❖ ***Dalam Pelaksanaan Program, Penunjang urusan Pemerintahan DaerahKeluaran sebagai berikut :***

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
3. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD.
4. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
5. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan.
6. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
7. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
8. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.
9. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
10. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan.
11. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
13. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
14. Jumlah Mebel yang di pelihara
15. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara
16. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang dipelihara/di rehabilitasi.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitudata desa yang mendapatkan fasilitasi penataan desa***.

➢ Realisasi keluaran Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan melakukan updating data Indeks Desa (Desa Mandiri, maju dan berkembang).

2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : data desa yang melaksanakan penetapan tata wilayah desa (Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016). Pada Tribulan I fasilitasi yang dilakukan adalah pendampingan pelaksanaan kesepakatan pemasangan pilar batas desa. Sedangkan untuk Verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial dan verifikasi yuridis dari Kementrian Hukum dan Ham serta Kemendagri belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan verifikasi teknis dan yuridis menunggu jadwal dan informasi dari Dinas PMD Prov Jawa Timur.
3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan keluaran jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Pada tribulan I belum ada hasil desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan rencana aksi program penataan desa, fasilitasi kewenangan desa dilaksanakan pada tribulan II.
4. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.Pada tribulan I fasilitasi sarana prasarana desa yang dilakukan adalah pendampingan kegiatan DPAL lanjutan BKK provinsi tahun 2024 yang tidak selesai dan dilanjutkan di tahun 2025.

- ***Dalam pelaksanaan Program Kerja sama Desa telah direalisasi keluaran yaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama desa***.
  - Realisasi keluaran Program Program Kerjasama Desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan kerjasama desa berupa : data desa yangmendapatkan fasilitasi di Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota

2. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran : Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa:***

Analisis Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025

- Analisis Capaian Kinerja dalam pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa Indikator keluaran adalah jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa.
- Realisasi keluaran program administrasi pemerintahan desa didukung keluaran dari kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berupa desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Tersusun.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan keluaran : Jumlah Anggota BPD Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa.Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa***

- Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa

  Pada Triwulan II Tahun 2025, pada Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang sangat berdampak pada pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat antara lain:

  Rencana pengalihan prioritas penggunaan dana desa dari anggaran untuk ketahanan pangan dialihkan ke modal penyertaan BUM Desa

  Dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih.

  Selain itu, fokus capaian kinerja pada Tribulan II difokuskan pada Fasilitasi pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II serta penyelesaian permasalahan desa
- Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa

  Walaupun ada beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang belum pasti dalam implementasinya dikarenakan regulasi yang belum siap. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kepada desa di kabupaten Nganjuk. Hal ini diimplementasikan pada 3 Subkegiatan, antara lain:

1. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

   Tugas dan fungsi pembinaan pada subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa diimplementasikan dengan melaksanakan bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa kepada 264 Sekretaris Desa di Kabupaten Nganjuk.

   Disamping melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa juga melaksanakan Fasilitasi Penyaluran Dana Desa serta Alokasi Dana Desa, sampai dengan 30 Juni 2025 diperoleh kinerja sebagai berikut:

   Penyaluran Dana Desa Tahap I: tersalur ke 263 Desa

   Penyaluran Dana Desa Tahap II: tersalur ke 91 Desa

   Penyaluran Alokasi Dana Desa I : tersalur ke 264 Desa

2. Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

   Wujud kerja sebagai upaya mencapai target kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang telah ditetapkan, Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

   Kerjasama dengan Samsat Nganjuk untuk meningkatkan kapasitas usaha BUM Desa di Kabupaten Nganjuk terkait dengan pembayaran pajak melalui BUM Desa.

3. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

   Pada fasilitasi pengelolaan aset desa, difokuskan pada penyusunan draf Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengelolaan Aset Desa. Disamping kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah evaluasi implementasi SIPADES 3.0 yang sampai dengan 30 Juni 2025 sudah diimplementasikan oleh 225 desa di Kabupaten Nganjuk.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat***.

Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat data keluaran/output sebagai berikut:

a. Fasilitasi penataan LKD dengan output pemenuhan legalitas LKD antara lain : posyandu (yang terdiri dari SK Tim pembina Posyandu Kabupaten, SK Tim pembina Posyandu Kecamatan, SK Tim pembina Posyandu Tk Desa, SK Posyandu (Kader dan pengurus), SK pemberian insentif Kader dan pengurus) dan SK KPM.
b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan ouput pembinaan KPM Stunting.
c. Pembinaan Gotong royong masyarakat dengan output terlaksananya penilaian pelaksanaan gotong royong.
d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan output terlaksananya pelatihan TTG (pembuatan produk dengan potensi desa pisang dan pelatihan pupuk organik) dalam rangka TMMD.
e. Fasilitasi TP PKK Kabupaten nganjuk dengan output fasilitasi pertemuan anggota PKK, fasilitasi pertemuan pleno, fasilitasi pertemuan pengurus inti PKK, fasilitasi pengumpulan laporan tahunan PKK Kecamatan, fasilitasi penyelesaian laporan tahunan PKK Kabupaten dan fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dan dalam daerah.

II. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Analisis realisasi output Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan keluaran DPA dan Anggaran Kas sudah dilaksanakan pada Tribulan I. Sedangkan DPPA dan Perubahan Anggaran Kas masih menunggu pengesahan dari Tim TAPD.

2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan keluaran 30 orang/bulan.
3. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan keluaran : Laporan LRA, Fungsional, DTH, laporan e-bupot / e-cortex dan verifikasi BMD per bulan. Laporan semesteran keuangan sudah dilaporkan.
4. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
5. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
6. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
7. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
8. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
9. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
10. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
11. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
13. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
14. Jumlah Mebel yang di pelihara dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
15. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
16. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang dipelihara/di rehabilitasi dengan keluaran : sudah dilaksanakan.

2. **Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data Desa yang *mendapatkan fasilitasi penataan desa***

   - Realisasi keluaran Program Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :

     1. Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan melakukan updating data Indeks Desa (Desa Mandiri, maju dan berkembang).
     2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : data desa yang melaksanakan penetapan tata wilayah desa (Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016). Pada Tribulan I fasilitasi yang dilakukan adalah pendampingan pelaksanaan kesepakatan pemasangan pilar batas desa. Sedangkan untuk Verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial dan verifikasi yuridis dari Kementrian Hukum dan Ham serta Kemendagri belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan verifikasi teknis dan yuridis menunggu jadwal dan informasi dari Dinas PMD Prov Jawa Timur.
     3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan keluaran jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Pada tribulan I belum ada hasil desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan rencana aksi program penataan desa, fasilitasi kewenangan desa dilaksanakan pada tribulan II.
     4. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.Pada tribulan I fasilitasi sarana prasarana desa yang dilakukan adalah pendampingan kegiatan DPAL lanjutan BKK provinsi tahun 2024 yang tidak selesai dan dilanjutkan di tahun 2025.

3. **Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kerja Sama Desa telah direalisasikeluaran yaitu dokumen hasil fasilitasi kerja sama desa**.

   - Realisasi keluaran Program Peningkatan Kerja Sama desa didukung keluaran dari kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa berupa : Dokumen hasil fasilitasi Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :

1. Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota ada 2 dokumen yang terdiri dari
   a. laporan Perkembangan Kegiatan Keuangan Bumdesma TW II
   b. Laporan Badan Pengawas Bumdesma TW II
2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa Pihak Ketiga dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebanyak 2 dokumen perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga.
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran : dokumen Evaluasi pembangunan Kawasan perdesaan. Pada tribulan I kegiatan fasilitasi yang dilakukan masih pada tahap mengaktifkan kembali Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang sudah dibentuk tahun 2019 dan pendampingan dalam menyusun program kerja khususnya untuk kecamatan Sawahan.

4. Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu
Bidang Bina Pemerintahan Desa.

- Realisasi Keluaran Progran Administrasi Pemerintahan Desa didukung keluaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

  1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa sebanyak 1 dokumen yaitu Rekapitulasi Laporan Administrasi Pemerintahan Desa, pada Tribulan II ini dalam Proses fasilitasi pembinaan dan pengawasan.
  2. Fasilitasi Produk Hukum Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 528 dokumen dilaksanakan mulai pada tribulan II, III dan IV. Pada tribulan II telah dilaksanakan rapat koordinasi tahapan penyusunan RKPDes Tahun 2026.

3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yaitu sebanyak 264 Dokumen, pada tribulan I dilaksanakan sosialisasi reviu perubahan RPJMDesa. Pada tribulan II telah dilaksanakan sosialisasi petunjuk teknis penyusunan RKP Desa Tahun 2026.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas yaitu 50 orang akan dilaksanakan pada tribulan III.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa yaitu 1 Laporan, dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 8 tahun sehingga tahun ini belum dilakukan pemilihan kepala desa. Sub Kegiatan ini dipergunakan untuk pembentukan Raperda tentang Desa yang pada tribulan II ini telah dilaksanakan FGD, Harmonisasi Raperda Desa dengan Kemenhum dan dilaksanakan tahap pembahasan dengan Pansus III DPRD.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu 1 Laporan. Pada tribulan I dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemberhentian perangkat desa karena usia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Tribulan II telah dilaksanakan fasilitasi pengajuan rekomendasi Bupati tentang pemberhentian perangkat desa.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun yaitu sebanyak 264 dokumen. Sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan II dan Tribulan III. Pada tribulan II telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi updating prodeskel.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD realisasi keluaran adalah Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas yaitu 50 orang. Sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan III.

9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa yaitu 2 Laporan. Sampai dengan tribulan II kepala Desa yang telah menyusun Laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebanyak 232 Desa atau 87 %.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yaitu 21 Dokumen. Sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan III.

5. Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu

Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa

Adapun target keluaran yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa:

1. Fasilitasi penyaluran dana Transfer desa kepada 264 desa
2. Bimtek pengelolaan keuangan desa kepada 264 desa
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan BUM Desa BUM Desa.
4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa.

6. Realisasi keluaran Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dimaksud didukung keluaran dari kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa : data desa yang Kelembagaannya diberdayakan melalui peningkatan kapasitas. Didukung oleh sub kegiatan :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan MasyarakatHukum Adat dengan keluaran : 52 Dokumen.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan keluaran : 234 Lembaga

3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan keluaran : 0 Dokumen
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan keluaran : 1 Laporan
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan keluaran : 0, tapi sudah proses pelaksanaan kegiatan.
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran : 22 dokumen.

III Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025

❖ **Realisasi Keuangan pada Program Dinas PMD Tahun 2025**

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan keluaran DPA dan Anggaran Kas sudah dilaksanakan pada Tribulan I. Sedangkan DPPA dan Perubahan Anggaran Kas masih menunggu pengesahan dari Tim TAPD.
2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN keluaran 30 orang/bulan dengan realisasi Rp. 1.787.075.612,-
3. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan realiasi Rp. 6.170.000,-
4. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 1.206.500,-.
5. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 18.040.531.
6. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 1.972.000,-
7. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 540.000.-
8. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 24.311.500,-

9. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 8.037.855,-
10. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 30.003.300,-
11. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 6.527.855,-
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 14.387.600,-
13. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 71.603.825,-
14. Jumlah Mebel yang di pelihara sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 3.270.750,-
15. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 16.845.000,-
16. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang di pelihara/di rehabilitasi sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 59.842.060,-

❖ **Realisasi keuangan Program Penataan Desa dan Tahun 2025 belum** dapat direalisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Kas karena

1. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa sudah dilaksanakan di tribulan II namun pembayaran kegiatan baru bisa terealisasi di tribulan berikutnya.
2. Kegiatan fasilitasi kewenangan desa sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan masih dalam proses.
3. Kegiatan fasilitasi sarpras desa yang bersumber dari BKK kabupaten sudah dilaksanakan di tribulan I namun pembayaran kegiatan baru bisa terealisasi di tribulan berikutnya.
4. Kegiatan fasilitasi tata wilayah desa sudah dilaksanakan di tribulan II namun pembayaran kegiatan baru bisa terealisasi di tribulan berikutnya.

a. Realisasi keuangan Program Peningkatan Kerja Sama Desa dan Tahun 2025
   - Kegiatan fasilitasi Kerjasama Desa antar desa dalam kabupaten/ kota pada tribulan II sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi sebesar Rp. 20.138.500,-
   - Kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga baru dilaksanakan pada tribulan ke dua sesuai anggaran kas dan rencana aksi kegiatan Penataan Desa Rp. 4.455.800,-
   - Kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan pada tribulan I sudah terealisasi sebesar Rp 5.700.000,-

b. Analisis Realisasi Keuangan Perangkat daerah tahun 2025

   Realisasi Keuangan Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Bina Pemerintahan Desa tahun 2025.

   Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelengagaran Administrasi Pemerintah desa Pada Triwulan I didukung oleh sub kegiatan Sbb:

   1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp 8.201.900,00 realisasi keuangan dalam proses pengajuan sehingga baru dapat terealisasi di tribulan berikutnya.
   2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan Anggaran sebesar Rp 59.168.500,00 sesuai dengan anggaran kas dilaksanakan di tribulan II, III, dan IV. Pada tribulan II ini anggaran untuk kegiatan tribulan II pada proses pengajuan.
   3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Anggaran sebesar Rp 25.273.500,00 realisasi keuangan pada proses pengajuan.
   4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.500,00 Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 975.000,00
   5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp 167.358.500,00 realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.748.100,00
   6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan anggaran Rp 7.279.400,00 realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp 1.700.000,00

7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp 9.056.000,00 realisasi keuangan sub kegiatan ini dalam proses pengajuan.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan anggaran sebesar Rp 6.078.800,00 sub kegiatan ini dilaksanakan pada Tribulan III.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp 7.618.000,00 realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.868.000,00
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 43.610.000,00 sub kegiatan ini dilaksanakan pada tribulan III.

❖ **Realisasi Keuangan Program Keuangan Aset dan Ekonomi Desa**

Adapun target keluaran sampai akhir tahun 2025 dan sedang proses penyusunan padaTriwulan II adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyaluran dana Transfer desa kepada 264 desa sudah tersalurkan ke 263 desa.
2. Bimtek pengelolaan keuangan desa kepada 264 desa sudah terlaksana
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan BUM Desa BUM Desa.
4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa.

❖ **Realisasi keuangan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2025

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp. **76.049.450,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **15.647.500,-** atau **20.57**%
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp **64.214.150,-** realisasi keuangan sebesar realisasi keuangan sebesar Rp. **33.680.000**,- atau **52.45**%
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Anggaran sebesar Rp. **14.842.800,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **707.000**,- atau **4.76**%.

- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Anggaran sebesar Rp. **62.784.000**,- realisasi keuangan sebesar Rp. **46.384.000,-** atau **73.88**%.
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Anggaran sebesar Rp. **29.102.700**,- realisasi keuangan sebesar Rp. **12.563.000**,- atau **43.17%**
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Anggaran Sebesar Rp. **367.651.500,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **92.354.204,-** atau **25.12%**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1	Tujuan Meningkatnya Kemandirian Desa	Dengan kegiatan Pemutakhiran Data Desa bersumber dari Data Profil Desa	Masih Banyaknya jumlah Desa dengan status indeks Desa Membangun dalam katagori berkembang dan Maju
2	Sasaran: 1 . Meningkatnya Kualitas Penataan Desa 2. Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Desa 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa 4. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Desa	Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.	Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3		Regulasi tentang Desa semakin lengkap.	Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4		Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.	Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5		Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.
6		Tersedianya dukungan anggaran APBD untukurusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7		Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.	Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
8		Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.	Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA).
9		Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat	Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	**2**	**3**	**4**
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**		
2	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		
3	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Telah dilakukannya kegiatan rutin update status desa secara berkala setiap tahun sehingga mudah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan	Pada tahun 2025 ini Adanya peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang sebelumnya 3 indikator menjadi 6 indikator maka perlu sosialisasi dan pendampingan yang intensif kepada desa pada saat melakukan pemutakhiran data indeks desa sehingga tidak terjadi penurunan status desa. Karena jumlah kuesioner yang banyak (1879 pertanyaan) memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
4			Pemahaman yang keliru dari pemerintah desa yang tidak mau meningkat status desanya karena takut anggaran Dana Desa Berkurang
5			Pada pelaksanaan update status desa, pemerintah desa terlalu bergantung pada pendamping desa
6	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Perpres no 23 tahun 2021 dan Permendagri 45 tahun 2016	Dukungan anggaran APBD yang kurang untuk pelaksanaan fasilitasi tata wilayah desa
7		Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi, Badan Informasi dan Geospasial dengan Dinas PMD Kabupaten selalu intens untuk percepatan kegiatan tata wilayah desa	Hasil pelaksanaan PPBDes harus mendapatkan berita acara verifikasi teknis dari BIG sebagai dasar penyusunan Perbup dan verifikasi yuridis dari Kemenkumham dan Kemendagri yang jadwalnya ditentukan oleh provinsi/ pusat sehingga memperlambat penyusunan perbup
8			Pemerintah Daerah tidak mempunyai tenaga teknis sehingga pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga/ swakelola tipe 2
9	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi penataan kewenangan desa	Belum semua pemerintah desa memahami tentang perdes kewenangan desa dan implementasinya

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
10		Perbup 35 tahun 2016 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan telah ditindaklanjuti oleh 264 desa yang sudah menyusun perdes kewenangan desa	
11	Fasilitasi sarana dan Pra SaranaDesa	Dukungan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa	Keterbatasan waktu pelaksanaan karena sarpras desa yang bersumber dari BKK baru bisa dilaksanakan setelah PAK
12	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		
13	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		
14	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	PP no 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Belum semua kegiatan kerjasama antar desa membentuk BKAD
15		Permendagri no 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa,	Kurangnya motivasi dari pengelola Bumdesma untuk membentuk unit usaha baru selain DBM
16		Permendesa no 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama,	Perlu adanya peningkatan kapasitas untuk direktur unit unit lain

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
17		Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	Efisiensi biaya operasinal Bumdesma perlu diperhatikan
18		Peraturan Bupati no 4 tahun 2022 tentang Perlindungan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Mlik Desa Bersama	
19		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa	
20		Telah bertransformasinya kegiatan pengelolaan DBM Eks PNPM menjadi Bumdesma Lkd	

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
21	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa	Perjanjian Kerja Sama yang dibuat masih sederhana dan belum menunjukkan menguntungkan bagi pemerintah desa
22		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antara desa dengan pihak ketiga	Belum semua desa yang sudah melakukan kerjasama desa dengan pihak ketiga melaporkan kepada Dinas PMD sehingga belum bisa memfasilitasi semua desa dan belum teridentifikasi semua permasalahan
23			Perlu adanya pembaharuan dokumen perjanjian kerjasama yang sudah habis masa berlakunya
24	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Permendes PDTT nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	Setelah pembentukan BKAD dan Bumdesma Kawasan tidak ada pendampingan sehingga tidak ada program kerja
25		Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk 2010-2030	
26		Perbup nomor 11 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Telah ditetapkannya Kawasan Perdesaan dengan SK Bupati Nganjuk Nomor 188/70/K/411.013/2016	Masing-masing desa masih memikirkan ego sektoral masing masing dan belum berfikir secara holistik dan kompherensif untuk bersama2 membangun kawasan perdesaan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
27		Adanya dukungan anggaran dari APBD untuk fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Belum dibuat perencanaan pengembangan kawasan yang matang dan belum ada penyertaan modal dari desa untuk pengembangan kawasan perdesaan
28		Telah dibentuk BKAD Kawasan dan Bumdesma Kawasan	Belum aktifnya Bumdesma Kawasan terutama untuk kecamatn Ngetos
29	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		
30	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		
31	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.	Aparat Pemerintahan Desa yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas administrasi. Kurangnya memahami prosedur administrasi yang benar,pengelolaan data, atau penggunaan teknologi informasi yang efektif.
32		Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	
33	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Keterbatasan SDM Perangkat Desa
34		Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa	Tidak tepat waktu dalam tahapan penyusunan produk hukum desa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
35		SK Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes	
36		Tim Evaluasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum desa	
37	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Keterbatasan kemampuan SDM Perangkat Desa
38		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang perencanaan
39		Tim Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
40	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi SISKEUDES, Peraturan Bupati No 57 jo. Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Kurangnya SDM untuk membina dan melaksanakan pendampingan, monitoring, evaluasi pelaksanaan APB Desa. Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan di Desa yang kurang optimal.
41	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Keterbatasan Kemampuan SDM Perangkat Desa
42		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan penguasaan teknologi informasi
43		Media Pembelajaran Mandiri Aparatur Pemerintah Desa (Sibermata Desa)	

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
44		Perangkat Desa Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
45	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pembinaan BUM Desa, Anggaran Penyertaan Modal dari APB Desa	Tidak adanya regulasi yang mewajibkan BUM Desa memberikan / mengirimkan data laporan pertanggungjawaban BUM Desa
46	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Adanya Kepala Desa yang bermasalah dengan hukum
47		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat
48		Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun	UU Nomor 3 Tahun 2024 belum ditindaklanjutan PP yang mengaturnya
49	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Proses pemberhentian dan pengangkatan terhambat karena UU 3/2024 belum adanya PPnya.
50		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Belum ada peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
51	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Proses penyusunan profil desa membutuhkan waktu dan upaya yang cukup. Namun, desa seringkali memiliki jadwal yang padat dengan sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan waktu dan personel yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari penyusunan profil desa.
52		Evaluasi Kinerja Desa	Keterbatasan data yang dimiliki oleh desa
53		Permendagri 12 Tahun 2007	Tidak melakukan upditing profil desa
54	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Aplikasi SIPADES 3.0	Kapasitas SDM Pengelola Aset Desa yang belum kuat.
55	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	SDM Anggota BPD kurang memadahi
56		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa dan Anggota BPD
57		Perpanjangan masa jabatan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun	
58		Media pembelajaran mandiri anggota BPD (Sibermata Desa)	

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
59		Anggota BPD Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
60	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
61			Keterbatasan SDM Pemerintahan Desa
62		Permendagri Nomor 46/ 2016	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Anggota BPD
63	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Keterbatasan Data yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa
64		Permendagri 81 tahun 2015	Pemerintahan desa kurang tertib dalam mengupdate Epdeskel
65	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		
66	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat**		

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
67	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar hukum legalitas LKD, Permendagri no 13 Tahun 2024 tentang Posyandu	Perlunya sosialisasi posyandu 6 SPM
68	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	anggaran pembinaan dari APBD, Perbup Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar peningkatan kapasitas	tidak semua LKD di libatkan dalam membantu pemerintah desa sesuai tupoksinya
69	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	anggaran pembinaan dari APBD, dukungan pembinaan lintas OPD sesuai tupoksinya	kurangnya usaha ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan BUMDesa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
70	Fasilitasi Pemerintah Desa dalamPemanfaatan Teknologi Tepat Guna	anggaran pembinaan dari APBD, anggaran dari APBDes	pemerintah desa belum menjadikan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai prioritas pembangunan di desa
71	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	anggaran pembinaan dari APBD	semakin lunturnya nilai gotong royong masyarakat, pemdes kurang aktif melaporkan kegiatan Gotong royong
72	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Perpres 99/2017 dan Permendagri 36/2020 yang mengatur tentang PKK, anggaran fasilitasi pembinaan dari APBD dan APBDesa, dukungan Pengurus TPPKK Kabupaten yang aktif	TPPKK Desa masih banyak yang tidak aktif, hanya menjadikan kegiatan PKK sebagai formalitas, banyak yang tidak membuat laporan tahunan PKK Sinergi TPPKK kabupaten dengan Perangkat daerah masih kurang

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Capaian Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2025 yang merupakan penjabaran Renstra DPMD tahun 2024 – 2026. Laporan dimaksud memuat informasi tentang Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2025 dan progress capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 yang implementasinya tertuang dalam RKA-K/L, serta permasalahan dan upaya penyelesiannya.

Penyusunan Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini diucapkan banyak terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sesuai tujuan penyusunannnya

IV.2. Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai, ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan dengan prioritas yang kecuali dalam mendukung IKU maupun IKI.

Untuk pelaksanaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat Daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik – baiknya. Setiap unsur perangkat Daerah senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur Perangkat daerah (bersinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan renja tahun berikutnya).

Rencana Tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
2. Memperkuat koordinasi sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder Dinas PMD
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjung lapang, pembuatan laporan rakor berkala, pendampingan teknis dan fasilitas lain terutama terhadap jajaran Pemerintahan Desa yang merupakan wilayah binaan Dinas PMD.
4. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur Kegiatan.
5. Memberikan reward dan punishmen sesuai dengan performasi masing – masing.

Nganjuk, 8 Juli 2025
Kepala Dinas PMD
Kabupaten Nganjuk

PUGUH HARNOTO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750708 199602 1 001

FORMULIR E B1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (oinput)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDv/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14=7+13			15=14/8		16
					K	Rp		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K		Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kemandirian Desa																													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	78,5	Nilai	23.081.208.000	71,7	Nilai	5.451.070.674	80	Nilai	8.237.402.191		Nilai	806.816.974		2.060.301.388						Nilai	2.667.118.362	71,7	Nilai	8.118.189.036	91,34	35,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	43	dokumen	126.000.000	10	dokumen	30.119.680	14	dokumen	39.307.200	7	dokumen	27.827.250	3	dokumen	10.467.000					10	dokumen	38.294.250	20	dokumen	68.413.930	46,51	54,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42	Laporan	126.000.000	9	Laporan	30.119.680	14	Laporan	39.307.200	7	Laporan	27.827.250	3	Laporan	10.467.000					10	Laporan	38.294.250	19	Laporan	68.413.930	45,24	54,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	285	dokumen	18.316.608.000	96	dokumen	4.074.169.175	105	dokumen	5.147.201.059	9	dokumen	463.146.691	24		1.793.245.612					33	dokumen	2.256.392.303	71,7	dokumen	6.330.561.478	24,90	34,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang/bulan	18.252.608.000	108	orang/bu	4.054.584.885	31	orang/bulan	5.134.488.059	31	orang/ bulan	462.426.691	31	orang/ bulan	1.787.075.612					62	orang/bulan	2.249.502.303	170	orang/bulan	6.304.087.188	500,00	34,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	24.000.000	2	Laporan	4.629.920	2	Laporan	5.691.000	2	Laporan	720.000	0	Laporan	0					2	Laporan	720.000	4	Laporan	5.349.920	66,67	22,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	204	Laporan	30.000.000	68	Laporan	14.954.320	72	Laporan	7.022.000	9	Laporan	-	21	Laporan	6.170.000					30	Laporan	6.170.000	98	Laporan	21.124.320	48,04	70,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	3612	dokumen	1.251.000.000	3602	dokumen	494.926.307	3.63	dokumen	379.620.800		dokumen	21.706.324			54.108.386					0	dokumen	75.814.710	71,7	dokumen	570.741.017	1,99	45,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	3	Paket	30.000.000	1	Paket	17.004.200	1	Paket	9.998.900	0	Paket	6.691.500	1	Paket	11.206.500					1	Paket	7.898.000	7	Paket	16.902.200	66,67	66,34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	24	Paket	330.000.000	8	Paket	74.667.898	6	Paket	57.975.400	2	Paket	9.651.220	0	Paket	18.040.331					2	Paket	27.691.751	10	Paket	102.359.649	41,67	31,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang di sediakan	6	Paket	21.000.000	2	Paket	3.049.170	2	Paket	7.152.900		Paket	-	2	Paket	1.972.000					2	Paket	1.972.000	4	Paket	5.021.170	66,67	23,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan perundang undangan yang disediakan	3	dokumen	12.000.000	1	dokumen	2.160.000	12	dokumen	3.000.000	3	dokumen	360.000	3	Dokumen	540.000					6	dokumen	900.000	7	dokumen	3.060.000	233,33	25,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14=7+13			15=14/6		16
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		2.13.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1800 Laporan	780.000.000		584 Laporan	377.829.691		550 Laporan	277.928.000	1 Laporan	376.000	48 Laporan	24.311.500					49 Laporan	24.687.500		633 Laporan	402.517.191		35,17	51,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen pengelola usahaan arsip dinamis pada SKPD	9000 dokumen	78.000.000		3000 dokumen	25.215.348		3000 dokumen	28.566.000	701 dokumen	4.627.604	1000 dokumen	8.037.855					1701 dokumen	12.665.459		4701 dokumen	37.680.897		52,73	48,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada yang di sediakan	223 unit	597.100.000		67 unit	238.291.000		8 unit	61.630.308	unit	-	4 unit	30.003.300					4 unit	30.003.300		71 unit	268.294.300		31,84	44,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	159 Unit	122.000.000		52 Unit	55.386.000		0 Unit	-	Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-		52 Unit	55.386.000		32,70	45,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesinlainnya yang di sediakan	47 Unit	475.100.000		15 Unit	182.905.000		4 Unit	61.630.308	0 Unit	-	4 Unit	30.003.300					4 Unit	30.003.300		19 Unit	212.908.300		40,43	64,81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150 Laporan	395.500.000		26 Laporan	83.195.484		50 Laporan	88.276.000	7 Laporan	14.934.603	7 Laporan	20.915.455					14 Laporan	35.850.058		40 Laporan	119.045.542		26,67	30,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	6 Laporan	75.500.000		2 Laporan	23.298.348		2 Laporan	26.276.000	1 Laporan	4.177.603	1 Laporan	8.527.855					2 Laporan	10.905.458		4 Laporan	34.201.806		66,67	45,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Air dan Listrik yang disediakan	144 Laporan	320.000.000		24 Laporan	59.899.136		24 Laporan	62.000.000	6 Laporan	10.557.000	6 Laporan	14.387.600					12 Laporan	24.944.600		36 Laporan	84.843.736		25,00	26,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan	382 Unit	2.395.000.000		85 Unit	530.369.078		69 Unit	511.366.824	Unit	79.202.106	39	151.561.635					39 Unit	230.763.741		124 Unit	761.192.819		32,46	31,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya	36 Unit	960.000.000		23 Unit	336.459.706		7 Unit	295.852.443	2 Unit	32.107.300	2 Unit	71.603.825					4 Unit	103.711.125		27 Unit	440.170.831		75,00	45,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09.0 005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang di pelihara	97 Unit	35.000.000		20 Unit	3.243.000		20 Unit	3.302.754	0 Unit	-	20 Unit	3.270.750					20 Unit	3.270.750		40 Unit	6.513.750		41,24	18,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang	63 Unit	150.000.000		40 Unit	38.728.703		40 Unit	38.850.000	5 Unit	-	15 Unit	16.845.000					20 Unit	16.845.000		60 Unit	55.073.703		89,55	36,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi	2 Unit	1.250.000.000		2 Unit	152.437.669		2 Unit	173.351.627	0 Unit	47.094.806	2 Unit	59.842.060					2 Unit	106.936.866		4 Unit	259.374.535		200,00	70,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Dengan Penataan Sesuai Standar Ketentuan	25 persen	900.000.000		27 persen	135.626.498		25 persen	63.964.100	0 persen		11,4 persen	440.000					11,4 persen	440.000		38,4 persen	136.066.498		153,60	15,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa	189 Desa	900.000.000		63 Desa	135.626.498		66 Desa	63.964.100	0 Desa	-	27 Desa	440.000					27 Desa	440.000		90 Desa	136.066.498		47,62	15,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01.0 001	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	20.000.000		0 Desa	-		1 Desa	11.017.650	0 Desa	-	0 Desa	-					0 Desa	-		0 Desa	-		0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01.0 002	Fasilitasi Tata Penataan wilayah	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	45 Desa	585.000.000		20 Desa	81.556.798		30 Desa	30.685.000	0 Desa	-	0 Desa	440.000					0 Desa	440.000		20 Desa	81.996.798		44,44	14,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01.0 003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60 Desa	90.000.000		30 Desa	12.397.000		25 Desa	7.779.700	0 Desa	-	27 Desa	-					27 Desa	-		57 Desa	12.397.000		95,00	13,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan) RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12			13			14=7+13		15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	60	Unit	225.000.000	23	Unit	41.672.700	10	Unit	14.482.250	0	Unit	-	0	Unit	-					0	Unit	-	23	Unit	41.672.700	38,33	18,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerja sama Secara Aktif	87	persen	627.000.000	70	persen	150.267.796	**87%**	**persen**	**121.864.950**		**persen**	**12.055.200**	**8**	**persen**	**32.398.884**					**8**	**persen**	44.454.084	78	**persen**	194.721.880	89,66	31,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dan Pembangunan	230	Desa	627.000.000	230	Desa	150.267.796	**230**	**Desa**	**121.864.950**		**Desa**	12.055.200	4	Dokumen	**32.398.884**					4	Desa	44.454.084	234	**Desa**	194.721.880	101,74	31,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerjasama Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	60	dokumen	426.000.000	20	dokumen	101.457.514	10	ddokumen	84.693.850	6	dokumen	7.940.588	2	Dokumen	26.358.044					8	dokumen	34.298.632	28	dokumen	135.756.146	46,67	31,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	60	dokumen	50.000.000	20	dokumen	6.113.300	15	ddokumen	5.047.750	0	dokumen	-	7	Dokumen	-					2	dokumen	-	22	dokumen	6.113.300	36,67	12,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.11.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	9	dokumen	151.000.000	3	dokumen	42.696.982	2	ddokumen	32.123.350	0	dokumen	4.114.612	0	Dokumen	6.040.840					0	dokumen	10.155.452	3	dokumen	52.852.434	33,33	35,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai Standar	100	persen	13.521.000.000	38	persen	5.365.595.355	100	**persen**	**3.318.503.825**		**persen**	607.667.840			**1.120.513.442,00**					0	persen	1.718.181.282	38	**persen**	7.093.776.637	38,00	52,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	264	Desa	13.521.000.000	263	Desa	5.365.595.355	**264**	**Desa**	**3.318.503.825**		**Desa**	607.667.840			1.120.513.442,00					0	Desa	1.718.181.282	263	**Desa**	7.093.776.637	99,62	52,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	15	dokumen	61.000.000	5	dokumen	9.997.000	4	ddokumen	8.201.900	0	dokumen	-	0	Dokumen	-					0	dokumen	-	5	dokumen	9.997.000	33,33	16,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk hukum Desa.	528	dokumen	240.000.000	528	dokumen	89.676.356	528	ddokumen	59.168.500	0	dokumen	-	0	Dokumen	-					0	dokumen	-	528	dokumen	89.676.356	100,00	37,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.	264	dokumen	175.000.000	264	dokumen	36.901.000	264	ddokumen	75.273.500	0	dokumen	-	0	Dokumen	-					0	dokumen	-	264	dokumen	36.901.000	100,00	21,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	264	dokumen	10.500.000.000	263	dokumen	4.790.569.434	264	ddokumen	2.907.391.775		dokumen	574.010.340			1.104.719.342					0	dokumen	1.678.729.682	263	dokumen	6.469.299.116	99,62	61,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	280	Orang	190.000.000	89	Orang	144.708.050	100	Orang	8.400.500	0	Orang	-	0	Orang	975.000					0	Orang	975.000	80	Orang	145.683.000	28,57	76,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	20	dokumen	555.000.000	20	dokumen	58.874.055	80	ddokumen	89.704.750	0	dokumen	13.657.500			-					0	dokumen	13.657.500	20	dokumen	92.531.555	100,00	16,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Laporan	810.000.000	1	Laporan	101.671.000	1	Laporan	167.358.500	0	Laporan	-	0	Laporan	7.748.100					0	Laporan	7.748.100	1	Laporan	109.429.100	100,00	13,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	Laporan	150.000.000	1	Laporan	5.250.000	1	Laporan	7.279.400	0	Laporan	-	0	Laporan	1.700.000					0	Laporan	1.700.000	1	Laporan	6.950.000	33,33	4,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	264	dokumen	120.000.000	264	dokumen	20.590.062	264	ddokumen	9.056.000	0	dokumen	-	0	Dokumen	-					0	dokumen	-	264	dokumen	20.590.062	100,00	17,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan (KPI) Kabupaten/Kota Tahun (n-1) (Kilas)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra Tahun 2024 (Kilas Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)			Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6			7			8		9		10		11		12		13				14=9+13			15=14/8		16
					K		Rp	K		Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp	K		
		2.13.04.2.01.0 013	Fasilitasi Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	30	dokumen	135.000.000	20	dokumen	19.286.448	264	dokumen	29.962.200	0	dokumen	-	0	Dokumen	1.303.000						0	dokumen	1.303.000	30	dokumen	40.783.448	100,00	23,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0 014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	80	Orang	130.000.000	80	Orang	19.529.500	100	Orang	6.678.800	0	Orang	-	0	Orang							0	Orang		80	Orang	19.529.500	100,00	14,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0 024	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	5	Laporan	140.000.000	3	Laporan	19.772.500	3	Laporan	7.618.000	1	Laporan	-	1	Laporan	3.858.000						2	Laporan	7.858.000	5	Laporan	23.642.500	83,33	9,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0 026	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa	21	dokumen	140.000.000	21	dokumen	28.750.000	21	dokumen	43.625.000	0	dokumen	-	0	Dokumen	-						0	dokumen	-	21	dokumen	28.750.000	100,00	11,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05	**PROGRAM PEMBEROAYAAN LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Desa Yang Kapasitas kelembagaanya diberdayakan	57	persen	2.222.000.000	78	persen	752.017.016	45	**persen**	**614.644.600**		**persen**	**6.833.200**	35	**persen**	**201.335.704**							35	**persen**	208.190.904	43	**persen**	960.207.940	110,53	43,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan	784	Desa	2.222.000.000	80	Desa	752.017.016	118	**Desa**	**614.644.600**		**Desa**	**6.833.200**			**201.335.704**							0	**Desa**	208.190.904	80	**Desa**	960.207.940	80,30	43,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0 002	Fasilitasi Penataan, Pembentayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyendu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pembentayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyendu, (PM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat	720	dokumen	195.000.000	240	dokumen	14.482.000	300	dokumen	76.049.630	0	dokumen	-	52	Dokumen	13.647.500							52	dokumen	13.647.500	292	dokumen	30.129.500	40,44	15,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Taruna), Lembaga LPM, dan Karang LPM, dan Karang Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	720 Lembaga	270.000.000	335 Lembaga	105.734.000	384 Lembaga	64.214.150	0 Lembaga	-	234 Lembaga	33.680.000					234 Lembaga	33.680.000	569 Lembaga	139.414.000	79,03	51,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa	60 dokumen	107.000.000	21 dokumen	39.503.000	2 dokumen	14.842.800	0 dokumen	-	0 Dokumen	707.000					0 dokumen	707.000	21 dokumen	40.210.000	35,00	37,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfataan teknologi Tepat Guna	60 Laporan	45.000.000	20 Laporan	84.586.000	2 Laporan	62.784.000	0 Laporan	-	1 Laporan	46.384.000					1 Laporan	46.384.000	21 Laporan	130.970.000	35,00	291,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	60 Laporan	105.000.000	20 Laporan	94.490.000	1 Laporan	29.102.700	0 Laporan	-	0 Laporan	12.563.000					0 Laporan	12.563.000	20 Laporan	107.053.000	33,33	101,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	305 dokumen	1.500.000.000	305 dokumen	413.222.036	110 dokumen	367.651.500	20 dokumen	6.855.200	22 Dokumen	92.354.204					42 dokumen	99.209.404	347 dokumen	512.431.440	113,77	34,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
										10.346.379.666		1.233.395.214		3.414.989.418											Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
																					Rata-rata capaian kinerja		73,94	38,42	
																					Predikat		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Nganjuk, 8 Juli 2025
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

PUJI HARNOTO, SSTP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750[illegible]99602 1 001